

ABSTRAK

Jaminan terhadap tempat kediaman perwakilan diplomatik dari sengketa perdata telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum internasional. Namun, pada tahun 2022, terjadi sengketa antara diplomat Republik Senegal dan pihak yang menyewakan sebuah rumah untuk tempat tinggal perwakilan diplomatik Republik Senegal di Quebec, Kanada. *Tribunal administratif du logement* memerintahkan juru sita untuk mengeksekusi putusan yang telah dijatuhkan terhadap diplomat Republik Senegal tersebut. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kekebalan perwakilan diplomatik. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekebalan perwakilan diplomatik terhadap sengketa perdata mengenai tempat kediaman perwakilan diplomatik dan penyelesaiannya berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Kanada. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif serta spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan memakai sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Melalui analisis kasus penyitaan properti Republik Senegal oleh tribunal, dapat diketahui perwakilan diplomatik tersebut memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi Kanada, termasuk bangunan yang digunakan untuk tempat kediamannya selama diperuntukkan menjalankan misi diplomatiknya. Namun, meskipun Kalsoum Sall memiliki kekebalan tersebut, Kalsoum Sall tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyewa, termasuk kewajiban membayar biaya sewa rumah kepada pemilik properti. Menurut Konvensi Wina 1961, sebelum menjalankan yurisdiksi pengadilan dan melaksanakan putusan, tribunal harus memperoleh penanggalan kekebalan diplomatik dari Republik Senegal. Namun, dalam *State Immunity Act* 1985, tribunal memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut tanpa terpengaruh kekebalannya. Dalam melaksanakan putusan, tribunal dibantu oleh juru sita tanpa adanya alat-alat negara.

Kata Kunci: Perwakilan Diplomatik, Sengketa Perdata, Tempat Kediaman

ABSTRACT

The guarantee for the residence of diplomatic representatives against civil disputes is regulated through various international legal provisions. In 2022, a dispute arose between a diplomat from the Republic of Senegal and the landlord of a house rented as the diplomatic residence in Quebec, Canada. The Tribunal administratif du logement ordered a bailiff to execute a decision against the Senegalese diplomat. This incident raised questions about the limits of diplomatic immunity. This research analyzes the immunity of diplomatic representatives in civil disputes concerning their residences and its resolution based on international law and Canadian national law. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using secondary data sources comprising primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and analyzed qualitatively. The case involving the seizure of Senegalese property by the tribunal shows that the diplomatic representative has immunity from Canadian jurisdiction, including buildings used as residences for diplomatic missions. However, despite Kalsoum Sall's immunity, she is still responsible for fulfilling her obligations as a tenant, including paying rent. According to the Vienna Convention of 1961, before exercising court jurisdiction and executing a decision, the tribunal must obtain a waiver of diplomatic immunity from the Republic of Senegal. Nonetheless, under the State Immunity Act 1985, the tribunal has the authority to hear and decide the dispute irrespective of such immunity. In executing the decision, the tribunal is assisted by a bailiff without using state instruments.

Keywords: Diplomatic Mission, Civil Dispute, Private Residence